

PENYETARAAN PROGRAM PAKET C DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA (Suatu Studi Di PKBM “Marga Jaya” Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya)

Oleh:
NOOR KARINA
NIM. E21110001

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak, 2015

ABSTRAK

Permasalahan penelitian pelaksanaan program ini yaitu rendahnya jumlah angka kelulusan hasil ujian kesetaraan Paket C, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, minimnya tenaga pendidik berdasarkan jumlah yang terbatas dan kurang memiliki latar belakang pendidikan guru, dan Sosialisasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak merata. Program ini bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan paket B, dan tidak tertampung pada jalur pendidikan formal. Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah George C. Edwards III yang mengemukakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan masalah bahwa implementasi kebijakan Program Kesetaraan Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif, hal ini dapat diindikasikan berdasarkan Komunikasi yang dilaksanakan melalui sosialisasi tidak merata dan angka ketidakhadiran menunjukkan kenaikan dengan persentasi sebanyak 21 orang yang mendaftar dengan kehadiran sebanyak 20 orang sedangkan ketidakhadiran sebanyak 1 orang dan angka kelulusan sebanyak 3 orang, jadi angka ketidakhadiran sebanyak 18 orang. Selain itu, minimnya jumlah tenaga pendidik yang disiapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” sebanyak 2 orang dengan latar belakang pendidikan SLTA 1 orang dan S1 1 orang. Kemudian tidak adanya gedung sendiri untuk melaksanakan Program Paket C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya sehingga menumpang menggunakan gedung SMA yang setara dengan paket C.

Kata-kata Kunci: Penyetaraan, Program Paket C, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, Struktur Birokrasi

ABSTRACT

The research of program implementation is low number of graduation rates equivalency test result paket C, limited facilities, minim educators and background teacher, and socialization delivered unclear and uneven. This program purpose to accomodate in formal education. Theory used in this paper is George C. Edward III, that suggest there are four factors that influence the effectiveness of policy implementation is communication, resources, attitude, and bureaucratic structure. Qualitative method with descriptive approach. The result of this study indicate that the issue of equality policy implementation program package C on the community learning center (PKBM) “Marga Jaya” in Department of Education had not been effective, this indicated based communication implemented unevenly and graduation rates show the presence of 20 people while the absence of one person and the passing score as many there people, so the failure as many 18 people. in addition to the inadequate number of educators prepare by community learning center (PKBM) “Marga Jaya” as two people, with a background of high school education one person and undrgraduated one person. And then, the absence of own building to implement the program package C by comminity learning center (PKBM) “Marga Jaya” in Department of Education Kubu Raya so that using the school building which is equivalent to the package C.

Keyword: Equivalent, Program Package C, Communication, Resources, Attitude, Bureaucratic Structure.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala aspeknya menuntut masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan sikap kemandirian. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, daya saing dan produktivitas sesuai dengan irama perubahan sosial yang ada.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan tidak dapat mengabaikan keberadaan pendidikan nonformal sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi melalui pendidikan formal dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sepanjang hayat mempengaruhi daya jangkauan layanan pendidikan nonformal. Tumbuh dan

berkembangnya lembaga, pengelola, dan unit pelaksana teknis pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan nonformal merupakan salah satu indikator kualitas partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas: pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. PKBM ini bisa berupa tingkat desa ataupun kecamatan.

Salah satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan dalam pendidikan nonformal adalah penyelenggaraan program Paket C. Program ini bertujuan untuk menampung masyarakat yang telah menyelesaikan program Paket B, dan tidak tertampung pada jalur pendidikan formal.

Hal ini bertujuan agar memiliki kemampuan setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas yang dilaksanakan oleh pendidikan formal.

Penyelenggaraan program Paket C merupakan salah satu program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menindak lanjuti pendidikan dasar 9 tahun. Melalui program Paket C warga belajar di persiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang mampu ber-interaksi positif dengan lingkungannya dan dapat mengembangkan ke tujuan penyelenggaraan program Paket C dapat tercapai apabila dalam sistem sosial masyarakat telah terjadi pemahaman positif terhadap keberadaan program, manfaat program, dan perhatian serius pemerintah terhadap pemerataan jangkauan pendidikan nonformal.

Program Paket C adalah program pendidikan lanjutan dari Paket B. Sedangkan pengertian Program Paket C dalam buku terbitan Direktorat Kesetaraan Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur nonformal setara SMA/MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih Pendidikan Kesetaraan untuk ket-untasan pendidikan menengah. Adapun Program Paket C ditujukan bagi warga masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi tidak dapat mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Lulusan Pakect

C berhak mendapatkan ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya mempunyai 4 bidang pemerintahan yang menangani pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing, adapun bidang-bidang pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
- b. Bidang Pendidikan Dasar
- c. Bidang SMA Dan SMK
- d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya membawahi 7 (tujuh) lembaga PKBM yang membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya didalam menyelenggarakan Program Paket C diantaranya:

- a. PKBM Marga Jaya
- b. Sanggar Kegiatan Belajar
- c. PKBM Lembayung
- d. PKBM Anggrek
- e. PKBM Terpadu
- f. PKBM Agatha
- g. LPLS Anugrah

Namun, penulis hanya mengambil 1 (satu) PKBM sebagai fokus penelitian yaitu PKBM "Marga Jaya" yang terletak di Jalan Pembangunan Patok 33 Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, status lembaga/kepemilikan merupakan Yayasan Pendidikan Non Formal dengan Status Hukum oleh mantan Bupati Bapak Muda Mahendrawan Nomor 23 Tahun 2008. Adapun izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya" merupakan rekomendasi kepada Kepala Desa Rasau Jaya II Nomor 425/137/Kemasyarakatan Tahun 2008, Camat Rasau Jaya Nomor 421.9/154/Pemasyarakatan, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Nomor 800/38/TU-UM Tahun 2008, Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Nomor 421.9/200a/Dik-D Tahun 2011. Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya mempunyai peran untuk mendata dan mengajukan nama-nama siswa yang akan mengikuti ujian Paket C akan tetapi yang menyelenggarakannya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya" tersebut.

Bidang Pendidikan Luar Sekolah merupakan bidang yang menangani pendidikan non formal pendidikan kesetaraan Paket C. Keterlibatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya" sangat mendorong peningkatan jumlah kelulusan peserta Paket C. Akan tetapi permasalahan yang terjadi bahwa jumlah angka

ketidakkelulusan lebih besar dibandingkan angka kelulusan terlihat dari jumlah peserta yang mendaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya" untuk mengikuti Program Kesetaraan Paket C Kabupaten Kubu Raya sebanyak 21 orang dengan kehadiran sebanyak 20 orang sedangkan ketidakhadiran sebanyak 1 orang dan angka kelulusan sebanyak 3 orang. Jadi angka ketidakkelulusan sebanyak 18 orang.

Program penyeteraan Paket C merupakan kebijakan standar program kesetaraan SMA dimaksudkan supaya masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMA dapat menempuh pendidikan luar sekolah yaitu Paket C. Oleh karena perlu adanya komunikasi dalam bentuk sosialisasi dengan melakukan pertemuan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dan pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya" sebagai penyelenggara serta menyebarkan surat edaran kepada perangkat daerah di masing-masing kecamatan atau sekolah-sekolah. Hal ini akan memudahkan penyampaian informasi secara jelas, cepat dan akurat, namun yang terjadi sosialisasi yang dilakukan hanya maksimal pada tataran atas saja, pada tataran masyarakat tidak semua masyarakat yang mengetahuinya sehingga proses komunikasi belum berjalan maksimal karena masyarakat yang

mengetahui dan mendaftar jumlahnya terbatas.

Selain itu, ketersediaan sumber daya pendukung yang cukup, handal dan trampil sangat diperlukan untuk melaksanakan kebijakan Program Paket C, pada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya" di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tenaga pendidiknya sangat minim yaitu berjumlah 2 orang terdiri dari SMA 1 orang dan S1 1 orang. Berdasarkan jumlah tenaga pendidik yang terbatas kemudian dibantu oleh swadaya masyarakat dan mahasiswa/i dengan kurang memiliki latar belakang guru menyebabkan kemampuan menyampaikan bahan ajaran yang diterima akan lambat. Hal tersebut berdampak pada rendahnya angka kelulusan yang mencapai 3 orang dari 20 yang mengikuti ujian Paket C. Selain itu juga lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Marga Jaya" Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tidak memiliki fasilitas gedung sekolah Paket C melainkan menumpang di gedung SMA sesuai dengan pakatnya.

Jadi setiap kali melaksanakan ujian Paket C dan proses belajar mengajar selalu menggunakan gedung SMA, hal ini dikarena keterbatasan fasilitas pendukung, sehingga semua fasilitas dari gedung, kursi, meja, papan tulis dan kelengkapan

mengajar lainnya masih menggunakan fasilitas sekolah yang ditumpangi. Kemudian sering terjadi rangkap jabatan dalam penyelenggaraan Program Paket C pada pembagian tugas tenaga pengajar dengan kekurangan tenaga pengajar mengakibatkan pembagian tugas terhadap tenaga pengajar didalam memberikan mata pelajaran menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan melebihi dari ketentuan PKBM "Marga Jaya" yang mana 1 guru mengajar 1 mata pelajaran melainkan yang terjadi 1 guru bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran karena kekurangan tenaga pengajar.

Menanggapi masalah diatas, Mengingat Kabupaten Kubu Raya termasuk daerah baru dimekarkan jadi perlu mendapat perhatian khusus dalam bidang pendidikan karena berdasarkan tahun 2012 lulusan SMP sebanyak 60.172 ribu orang atau 22, 20 % dan lulusan SMA sebesar 36.324 ribu orang atau 13, 40% jadi terdapat sebesar 23.848 orang atau 8,8 % anak yang diperkirakan tidak melanjutkan ke jenjang SMA tiap tahunnya, hal ini dikarenakan angkatan kelulusan SMP lebih besar dibandingkan angkatan lulusan SMA. Permasalahan tersebut diakibatkan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang berpenghasilan menengah kebawah dengan

bermata pencaharian sebagai Petani sebanyak 389.030 orang atau 64,93%. Sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Kubu Raya sebesar 6.985,20 km² mempunyai jumlah penduduk sebanyak 560.472 orang, yang memiliki 113 Desa atau Kelurahan dengan Desa tertinggal 76 sehingga Desa majunya sekitar 37 Desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah Implementasi Program Kesetaraan Paket C Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kerangka Teori

Menurut George C. Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi (*communication*), bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah keatas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan kebawah, perlu adanya

ketepatan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas isi informasi yang di sampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsisten dalam menyampaikan informasi.

b. Sumber daya (*resources*), sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber daya yang dibutuhkan tidak memadai atau relevan.

c. Disposisi atau sikap (*disposition or attitudes*), dalam hal ini yang terpenting adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung pada sejauh mana wewenang yang ada padanya.

d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), bahwa pada dasarnya suatu kebijakan, seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang ter-

libat. Struktur birokrasi yang demikian sangat memerlukan koordinasi, tanpa adanya koordinasi yang efektif tidak mungkin diharapkan implementasi kebijakan akan berhasil dengan baik.

Lester dan Stewart Jr (dalam Agustinus, 2006:139) mengemukakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat melalui proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin di raih. Sedangkan keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:94) dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu: pertama, isi kebijakan yang menyangkut kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang di inginkan, letak pengambil keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan dan yang kedua, lingkungan implementasi dimana kebijakan tersebut diterapkan.

b. Kerangka Pikir Penelitian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MASALAH

- Rendahnya jumlah angka kelulusan hasil ujian kesetaraan paket C
- Terbatasnya fasilitas yang dimiliki
- Minimnya tenaga pendidik berdasarkan jumlah yang terbatas dan kurang memiliki latar belakang pendidikan guru
- Sosialisasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak merata

TEORI

Menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:150) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yaitu:

- Komunikasi (Communication), terdiri dari: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi
- Sumber Daya (Resources), terdiri dari: Staff, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas
- Disposisi atau Sikap (Disposition of Attitudes)
- Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Terdiri dari: Pembagian tugas

Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan Melalui Program Paket C

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan analisis data secara Kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilaksanakan. Fokus dalam penelitian ini pada: Efektifitas Implementasi Program Kesetaraan Paket C Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” Di Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih konkrit, lengkap dan objektif tentang masalah yang diteliti serta sesuai dengan tujuan penelitian maka, penulis menentukan informan kunci dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah
- b. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional
- c. Kepala PKBM “Marga Jaya”
- d. Tenaga Pendidik
- e. 5 orang Peserta Paket C

Sedangkan Obyek penelitian ini adalah Efektifitas Implementasi Program Kesetaraan Paket C Di Dinas Pendidikan

Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Di PKBM “Marga Jaya” Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan Teknik Wawancara, Teknik Observasi Dan Teknik Wawancara. Teknik analisis data yaitu menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan Dan Verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik yang dipilih oleh pemerintah juga memungkinkan timbulnya pro dan kontra dari berbagai pihak karena kebijakan politik bukan merupakan jawaban final, lengkap atau jawaban akhir atas permasalahan sosial. Kebijakan publik tidak serta merta hadir begitu saja. Terdapat beberapa proses atau tahap yang harus dilalui dan implementasi merupakan tahap paling krusial dalam proses kebijakan publik. Demikian pula dengan program penyetaraan Paket C oleh Dinas Pendidikan Kubu Raya dalam pengimplementasiannya pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” di Desa Rasau Jaya II Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ini tidak begitu mudah.

Dari pemahaman diatas terdapat permasalahan Rendahnya jumlah angka

kelulusan hasil ujian kesetaraan Paket C, Terbatasnya fasilitas yang dimiliki PKBM “Marga Jaya”, Minimnya tenaga pendidik berdasarkan jumlah yang terbatas dan kurang memiliki latar belakang pendidikan guru, Sosialisasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak merata. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan pelaksanaan program Paket C berdasarkan masalah diatas peneliti menggunakan indikator-indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh George C Edward III (dalam Agustino, 2006:150) yang melihat permasalahan dari sudut pandang:

a. Komunikasi

Secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai salah satu usaha untuk menyampaikan atau menyebarluaskan sebuah informasi yang jelas dan benar serta objek yang tepat, sebagai salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, adapun cakupan dari penyebaran informasi secara khusus adalah masyarakat yang memiliki pendidikan dibawah SMA kemudian memerlukan ijazah Kesetaraan Paket C SMA untuk persyaratan pekerjaan.

Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud upaya masyarakat memahami tentang adanya Program Paket C ini, dan menginformasikan pelaksanaan ujian Paket

C supaya masyarakat dapat mendaftarkan diri kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” yang nantinya akan didata oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan masyarakat akan Paket C selama ini sangat kurang sekali, dimana menganggap bahwa program tersebut tidak setara dengan SMA. Melainkan sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa hasil pendidikan nasional dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal.

Melihat permasalahan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mendorong pentingnya komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat dari pada Program Paket C ini, melalui sosialisasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya dapat mengetahui program ini dan dapat mendaftarkan diri sebagai persyaratan apabila ingin mendapatkan pekerjaan berdasarkan ijazah SMA.

Hasil wawancara terhadap peserta didik juga menegaskan sebagai informan, dengan menyatakan:

“kalo sosialisasi yang dilakukan itu nggak ade, yang saya tau kan biasanya program paket c itu adanya setelah dengar kelulusan sma, hasil kelulusan itu kadang-

kadang ada pelajar yang nggak lulus dan ada juga masyarakat yang putus sekolah karena ingin mendapatkan ijazah sma makanya mengikuti program ini. Sedangkan ujian sma itu dilaksanakan biasanya awal tahun antara bulan 3 dan 4 geto lah. Jadi, ya sebelumnya saya nanyanya dulu ke PKBMnya apa-apa aja syaratnya trus tata cara pendaftarannya kayak gimana. Setelah mengetahui semua itu barulah saya daftar kan diri karena berminat untuk ikut mendapatkan ijazah sma ini”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peserta didik yang mengikuti program Paket C tersebut menegaskan bahwa tidak mengetahui akan adanya sosialisasi Paket C karena untuk mengetahui akan adanya pelaksanaan program Paket C langsung mendatangi PKBM “Marga Jaya” yang terdapat di Desa Rasau Jaya II, seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan paket biasanya dilaksanakan setelah siswa/siswi SMA mendengar kelulusan karena terdapat siswa/siswi yang tidak lulus ujian sedangkan ujian nasional SMA diadakan antara bulan 3 dan 4 sehingga sebelumnya peserta didik menanyakan persyaratan dan tata cara pendaftaran untuk mengikuti program Paket C tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengakibatkan tidak

adanya informasi mengenai program Paket C kepada masyarakat.

b. Sumber Daya

Jumlah peserta yang mendaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” untuk mengikuti Program Kesetaraan Paket C sebanyak 21 orang dengan kehadiran sebanyak 20 orang sedangkan ketidakhadiran sebanyak 1 orang dan angka kelulusan sebanyak 3 orang. Jadi angka ketidaklulusan sebanyak 18 orang, melihat permasalahan jumlah angka ketidaklulusan lebih besar dibandingkan angka kelulusan pihak penyelenggara Program Paket C harus lebih memperhatikan anak didiknya pada saat proses belajar mengajar supaya tingkat kelulusan semakin meningkat dengan memberikan kurikulum yang bermutu dan berkualitas supaya cepat dipahami.

Keseluruhan tenaga pendidik yang terdapat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” pada Program Paket C berjumlah 2 orang yang terdiri dari 0 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari 1 orang memiliki pendidikan SMA, 0 orang memiliki pendidikan D3 dan 1 orang memiliki pendidikan S1. Berdasarkan wawancara berkaitan dengan sumber daya staf kepada Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan

Keaksaraan Fungsional Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, mengatakan bahwa:

“kita lihat itu sangat berkurang karena tenaga pendidiknyanya itu banyak kalangan dari SMA, jadi itu dari swadaya masyarakat yang membantu untuk mengajar karena dimana disini mereka tidak dibayar. Jadi dalam arti untuk masalah tenaga pendidiknyanya sangat kurang, jadi kita minimnya disitu, hampir rata-rata itu kita meminta bantuan dari luar yaitu masyarakat dan kadang-kadang dibantu juga sama mahasiswa PPL yang kita pakai dari sekolah-sekolah”.

Berdasarkan uraian diatas pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dan Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional, menyampaikan tenaga pendidik pada Program Paket C untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” sangat kurang sekali, adapun yang tersedia kadang-kadang tidak seimbang dengan jumlah mata pelajaran yang di jadwalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, terdapat swadaya masyarakat sekitar untuk membantu menyukseskan pelaksanaan Paket C ini dengan menjadi tenaga pendidik, walaupun dari segi kemampuan dan keterampilan

mereka belum mempunyai latar belakang mengajar, namun swadaya masyarakat sangat membantu pihak penyelenggara yaitu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” untuk melaksanakan ujian Paket C dan proses belajar mengajar.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana atau prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan wawancara berkaitan dengan sumber daya fasilitas fisik kepada Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, mengatakan bahwa:

“untuk fasilitasnya itu dilihat sangat minim sarana dan prasarananya, itu karena dimana mereka saat ini menumpang dimana disitu ya... jadi untuk perawatannya tetap peserta didik yang menyiapkan semuanya jadi itu juga mempengaruhi kegiatan proses belajar mengajarnya jadi diharapkan untuk ada pembantuan dari sarana dan prasarananya. Karena saat ini kita masih tetap untuk

ujiannya masih menggunakan sekolah-sekolah yang sesuai dengan pakatnya, untuk paket A ke SD, paket B ke SMP, paket C ke SMA jadi kita pada saat untuk ujian itu kita mau gag mau menampung kesekolah-sekolah tersebut”

Berdasarkan uraian diatas, seperti yang disampaikan pihak Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dan Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional menunjukkan dari segi fasilitas pelaksanaan Paket C sangat minim, adapun keterbatasan itu meliputi lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” dalam melaksanakan Paket C tidak memiliki gedung sendiri melainkan menumpang di gedung SMA sesuai dengan pakatnya. Jadi setiap kali melaksanakan ujian Paket C dan proses belajar mengajar selalu menggunakan gedung SMA. Maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan dari fasilitas pendukung yaitu gedung, jika keterbatasan itu tidak diperbaiki dikemudian harinya pelaksanaan Program Paket C ini tidak akan ada perubahan dari kualitasnya.

c. Sikap Atau Disposisi

Masyarakat dituntut untuk pro aktif dalam menyukseskan Program Kesetaraan Paket C ini, apabila pada

tataran pelaksanaan ujian Paket C dan proses belajar mengajar tersebut mengalami permasalahan dari jumlah masyarakat yang mendaftar Paket C tidak sesuai dengan masyarakat yang ikut Paket C. Untuk itu pemerintah perlu adanya perhatian khusus dengan membangun semangat masyarakat supaya dapat berpartisipasi meningkatkan Kesetaraan Pendidikan Paket C Di Dinas Pendidikan Kab- upaten Kubu Raya.

Mengingat Kabupaten Kubu Raya termasuk daerah baru dimekarkan jadi perlu mendapat perhatian khusus dalam bidang pendidikan karena berdasarkan tahun 2012 lulusan SMP sebanyak 60.172 ribu orang atau 22, 20 % dan lulusan SMA sebesar 36.324 ribu orang atau 13, 40% jadi terdapat sebesar 23.848 orang atau 8,8 % anak yang diperkirakan tidak melanjutkan kejenjang SMA tiap tahunnya, hal ini dikarenakan angkatan kelulusan SMP lebih besar dibandingkan angkatan lulusan SMA. Permasalahan tersebut diakibatkan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang berpenghasilan menengah kebawah dengan bermata pencahariaan sebagai Petani sebanyak 389.030 orang atau 64,93%. Berdasarkan wawancara berkaitan dengan sikap atau disposisi terhadap Program Kesetaraan Paket C Kepada Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Keaksaraan

Fungsional Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, mengatakan bahwa:

“diharapkan untuk ada perhatian dari pemerintah karena bagaimanapun paket c ini sudah setara sama dengan kelulusan, karena ini juga berpengaruh untuk peserta didik tersebut. Karena untuk paket c ini juga digunakan untuk melanjutkan pendidikan negeri lebih tinggi dan untuk bekerja di dunia swasta, jadi diharapkan sama pemerintah untuk memperhatikan dari tenaga pendidiknya, sarana dan prasaranya dan fasilitas itu yang kita harapkan”.

Berdasarkan uraian diatas yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesetaraan Dan Keaksaraan Fungsional, mempunyai harapan pemerintah supaya dapat lebih memperhatikan pelaksanaan Paket C ini. Berdasarkan standar pendidikan, pada saat melanjutkan ke tingkat pendidikan lanjut misalkan: perguruan tinggi, ijazah Kesetaraan Paket C sangat diperlukan sebagai persyaratan administrasi, kalau masyarakat tidak memiliki ijazah SMA maka terhambat tidak akan bisa mengikutinya. Hal yang sama juga dirasakan bagi pekerja yang ingin memperoleh pekerjaan dengan persyaratan minimal ijazah SMA, jadi Program Paket C ini memudahkan bagi masyarakat dengan

pendidikan dibawah minimal untuk dapat mengikuti program paket C tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Dengan adanya pembagian tugas, maka diberikan kewenangan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Seiring dengan pemberian kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas yang dimaksud, harus disertai tanggung jawab yang jelas dalam menentukan siapa yang pantas untuk diberikan wewenang merupakan suatu kebijakan atasan ataupun lembaga. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan dan kekurangan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevan sesuai fakta. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan didalam organisasi yang baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga implementasi Program Kesetaraan Paket C Di Kabupaten Kubu Raya dapat meningkatkan pendidikan masyarakat.

Berikut wawancara yang dilakukan terhadap tenaga pendidik yang menyampaikan:

“ya... tentu kami semua tenaga pendidik PKBM yang ada menjalankan tugas sesuai tugas pokoknya masing-masing, kami semua

udah mempunyai tugas masing-masing untuk menjalankan tugas pokok tersebut. Tugas pokok kami kan udah diatur yaitu mengajar dengan memberikaan materi yang telah disusun dalam kurikulum dinas pendidikan, dan itulah yag menjadi acuan kami bekerja. Cuma terkadang dengan keterbatasan tenaga pengajar kami harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran karena kekurangan tenaga pengajar”

Berdasarkan uraian diatas, Kepala PKBM dan tenaga pendidik menyampaikan bahwa penyelenggaraan Program Paket C tersebut sudah dilakukan pembagian tugas namun dengan kekurangan tenaga pengajar mengakibatkan pembagian tugas terhadap tenaga pengajar didalam memberikan mata pelajaran menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan melebihi dari ketentuan PKBM “Marga Jaya” yang mana 1 guru mengajar 1 mata pelajaran melainkan yang terjadi 1 guru bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran karena kekurangan tenaga pengajar.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah penulis utarakan, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan penyetaraan program paket C di Dinas Pendidikan Kubu Raya adapun variable-variable yang dimaksud diantaranya yaitu:

a. Komunikasi, Menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya belum berjalan maksimal karena disebabkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya Program Paket C ini, selain itu juga jangkauan wilayah Kabupaten Kubu Raya yang sulit dijangkau karena terdapat sungai yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga menyulitkan penyampaian informasi kepada masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui sosialisasi, akan tetapi kurang nya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan kesetaraan menimbulkan tingkat partisipasi masyarakat mengikuti Program Paket C kurang memperhatikan dan menganggap sepele kebijakan ini hal ini dikarenakan latar belakang ekonomi masyarakat yang masih rendah dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 500.000 per orang.

- b. Sumber daya, ketersediaan sumber daya untuk Program Paket C sangat kurang sekali, pada tenaga pendidik adapun yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah mata pelajaran yang dijadwalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu mengakibatkan proses pembelajaran terkadang tidak dapat diterima dengan baik bagi peserta didik terlihat dari angka ketiakkululusan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” yang cenderung tinggi yaitu 18 orang dari 21 peserta. Selain itu, dari segi fasilitas pelaksanaan Program Paket C sangat minim, adapun keterbatasan itu tidak memiliki gedung sendiri melainkan menumpang di gedung SMA sesuai dengan paketnya.
- c. Sikap, implementor dalam melaksanakan Program Paket C ini sudah dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari harapan dan dukungan terhadap Program Paket C ini supaya dapat berjalan sesuai dengan standar pendidikan yang ada.
- d. Struktur birokrasi, pembagian tugas sudah jelas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, jadi masing-masing lembaga sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan berdasarkan bidangnya masing-masing. Namun sering terjadi rangkap jabatan dalam

penyelenggaraan Program Paket C pada pembagian tugas tenaga pengajar dengan kekurangan tenaga pengajar mengakibatkan pembagian tugas terhadap tenaga pengajar didalam memberikan mata pelajaran menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan melebihi dari ketentuan PKBM “Marga Jaya” yang mana 1 guru mengajar 1 mata pelajaran melainkan yang terjadi 1 guru bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran karena kekurangan tenaga pengajar.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis merasa sangat perlu untuk memberikan masukan agar kedepannya penyetaraan program paket C di Dinas Pendidikan Kubu Raya lebih baik. Adapun saran yang dapat diberikan penulis sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, Pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Marga Jaya” dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya harus lebih memperhatikan dalam hal menyampaikan informasi yang jelas kepada setiap masyarakat supaya dapat dipahami dan dimengerti.
- b. Sumber Daya, Berkaitan dengan sumber daya, walaupun kebijakan

sudah disosialisasikan tanpa adanya sumber daya sangat mustahil berjalan efektif, dengan demikian perlulah adanya penambahan pada aspek-aspek tertentu di bidang sumber daya.

- c. Sikap, Peningkatan standar jumlah hasil kelulusan Program Paket C harus ditingkatkan lagi tiap tahunnya agar tingkat pendidikan dapat sesuai standar pemerintah.
- d. Struktur Birokrasi, Prosedur pembagian tugas sudah berjalan baik sesuai TUPOKSI nya masing, namun pada saat pengrekrutan tenaga pendidik perlu menilai beberapa kriteria supaya memperoleh tenaga pendidik yang terampil, berkualitas dan berkemampuan IPTEK.

Sudjana. 2001. *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Asas*. Bandung: Falah Production

Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bsdung: Alfabeta

Sutopo, Heribertus. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: UNS

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik: AIPI*

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Pemerintah

Depdiknas. 2001. *Keputusan Mendiknas nomor: 055/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga*. Jakarta: Ditjen PLSPD.

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Nugroho, Riant. D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Gramedia

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Adminitrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NOOR KARINA

NIM / Periode Lulus : E21110001/2015

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : noor.karina@yahoo.co.id / 082150307799

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM KESETARAAN PAKET C
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA
Suatu Studi Di PKBM "Marga Jaya" Desa Rasau Jaya II
Kecamatan Rasau Jaya**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal... 7... 7... 2015..

Dr. Arifin, S.Sos, M. AB
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada : Juli 2015

Noor Karina
E21110001